

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**Leo Devid Sumigar¹, Debby Christina Rotinsulu², Ita Pingkan F. Rorong³**¹²³*Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia**E-mail: sumigarleo97@gmail.com***ABSTRAK**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mencatat, mengukur, menilai, dan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian kemandirian, efektivitas dan efisiensi secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kemandirian, efektivitas, dan efisiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, baik secara simultan maupun secara parsial. Saran dalam penelitian ini yaitu: 1) bagi Pemerintah, penelitian ini berfungsi sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk memperhatikan konsep *value of money* yang terdiri atas tiga hal yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus memiliki pertimbangan agar postur anggaran tidak mengalami defisit di setiap tahunnya dan dapat mempertahankan pencapaian realisasi penerimaannya. 2) bagi Pembaca, penelitian ini sebagai pengingat kepada para pembaca yang sudah memiliki NPWP untuk melakukan kewajibannya berupa membayar pajak, karena hal ini akan berdampak terhadap kinerja keuangan di daerah setempat, dan 3) bagi Peneliti Selanjutnya, disarankan menggunakan tambahan variabel independen lainnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah.

Kata Kunci: Kemandirian; Efektivitas; Efisiensi; Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

Local government financial performance is a tool that can be used to record, measure, assess, and achieve the implementation of regional financial management. The purpose of this study is to determine and analyze the effect of independence, effectiveness and efficiency simultaneously on the financial performance of the Southeast Minahasa Regency Government. The research approach used in this research is quantitative research with a descriptive approach. The results of hypothesis testing indicate that independence, effectiveness, and efficiency have a significant effect on the financial performance of local governments in Southeast Minahasa Regency, either simultaneously or partially. Suggestions in this study are: 1) for the Government, this research serves as input to the government of Southeast Minahasa Regency to pay attention to the concept of value of money which consists of three things, namely economic, efficiency, and effective so as to aim to improve financial performance in Southeast Minahasa Regency. In addition, the Southeast Minahasa Regency government must have considerations so that the budget posture does not experience a deficit every year and can maintain the achievement of its revenue realization. 2) for readers, this research is a reminder to readers who already have a NPWP to carry out their obligations in the form of paying taxes, because this will have an impact on financial performance in the local area, and 3) for further researchers, it is recommended to use additional independent variables related to with local financial performance.

Keywords: *Independence; Effectiveness; Efficiency; Regional Financial Performance*

1. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu Negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Syam (2016) kinerja keuangan menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Hukum Wagner atau dikenal 'undang-undang perluasan pengeluaran negara adalah bahwa jika kinerja keuangan suatu daerah meningkat maka pemerintah akan meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki dan melengkapi fasilitas infrastruktur dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan belanja pemerintah akan meningkatkan produksi sehingga mendorong kinerja

keuangan (Restianto, 2011) . Secara umum kinerja keuangan dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Secara spesifik menyebutkan ada tiga factor atau komponen utama kinerja keuangan, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang kinerja keuangan (Sularno, 2011).

Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan peningkatan kinerja keuangan yang ditandai dengan pencapaian peningkatan PDRB dari tahun ke tahun. Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variabel yang penting dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pendapatan asli daerah umumnya. Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara pendapatan asli daerah dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah ke pendapatan asli daerah APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah ke Pendapatan Asli Daerah pemerintah pusat. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan pendapatan asli daerah bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pendapatan asli daerah akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan indikator kemandirian daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar pendapatan asli daerah suatu wilayah, semakin independen wilayahnya. Tetapi untuk pencapaian pendapatan asli daerah apa pun, jika ada efisiensi dalam manajemen, jumlah pendapatan asli daerah akan terserap untuk pembiayaan operasional (Syam, 2016).

Dalam kinerja keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara mampu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2005 sampai dengan 2019. Adapun realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2005 - 2019

Tahun	Pendapatan		
	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Dana Perimbangan (Rp.)	Lain-Lain Pendapatan yang Sah (Rp.)
2005	3.139.211	233.299.810	0
2006	33.995.360	231.231.916	12.120.000
2007	41.369.900	374.710.243	8.913.000
2008	47.516.790	402.456.040	5.055.340
2009	53.250.000	453.839.460	43.000.000
2010	64.250.000	510.839.460	48.020.000
2011	73.404.996	520.698.963	54.065.891
2012	119.646.709	494.817.254	38.999.999
2013	144.721.723	574.504.145	189.927.090
2014	159.019.275	677.121.867	71.523.457.000
2015	225.871.043	767.043.192	85.106.655.607
2016	273.392.316	823.013.594	98.830.715.486
2017	292.525.557	936.967.599	136.342.919.978
2018	354.955.423	1.131.123.897	168.628.335.732
2019	316.767.257	1.136.141.852	148.597.400.748

Sumber : BPS Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mulai dari tahun 2005 sampai 2019 mengalami

pertumbuhan secara positif. Demikian juga dengan dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dan Lain-Lain Pendapatan yang sah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami naik turun yaitu terjadi pada tahun 2008 menjadi Rp. 5.055.340 dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 38.999.999.

Penelitian tentang kemandirian, efektivitas, dan efisiensi kinerja keuangan daerah ini dilakukan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data yang sama pada masing-masing unit organisasi (SKPD) yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan yang keempat untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian efektivitas dan efisiensi secara simultan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Pembangunan

Mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi (Subandi, 2017). Ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu dari ilmu ekonomi yang bertujuan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh cara/metode penyelesaian dalam pembanguana ekonomi, terutama di Negara-negara berkembang, agar pembangunan ekonomi menjadi lebih cepat dan harmonis (Mahyudi, 2018).

2.2 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam otonomi daerah karena keuangan daerah mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurus pemerintahan (Halim, 2015). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Kuswadi, 2016).

2.3 Kinerja Keuangan

Fahmi (2012) mendefinisikan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Handayani (2013) mengemukakan kinerja keuangan adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran. Kurniasari (2014) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan. Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan adalah proses analisis atau prestasi kerja yang dilakukan di bidang keuangan dalam pencapaian suatu pelaksanaan program dalam mewujudkan sasaran.

2.4 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap

bantuan dana eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Faud, 2016). Pemerintah Daerah masih belum mampu secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kemudian ini juga berarti bahwa peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah adalah masih sangat rendah, yang dalam hal ini berupa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi (Hariani, 2021).

2.5 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan (nisbah) antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan (Halim, 2015). Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan PAD (Mahmudi, 2007). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa semakin besar realisasi penerimaan APBD terhadap target penerimaan APBD, maka rasio efektivitas keuangan daerah akan semakin besar atau sebaliknya. Semakin tinggi rasio efektivitas keuangan daerah, maka daerah telah menggunakan APBD secara efektif dalam membiayai kegiatan atau program kerja dalam rangka melaksanakan pembangunan dan mensejahterakan masyarakatnya atau sebaliknya.

2.6 Rasio Efisiensi

Sartika (2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Amala, Rotinsulu dan Tumangkeng (2021) dengan judul: "Peranan sektor basis terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Toraja Utara". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor basis dan sektor apa saja yang mempunyai perkembangan paling produktif untuk mendorong laku kinerja keuangan di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Toraja Utara terdiri atas 11 sektor yakni Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor real estate, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Sektor Jasa lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Erjergit, Rorong dan Tolosang (2021) judul: "Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi swasta terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Sorong dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sementara untuk investasi swasta tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan secara bersama pengeluaran pemerintah dan investasi swasta dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Sorong.

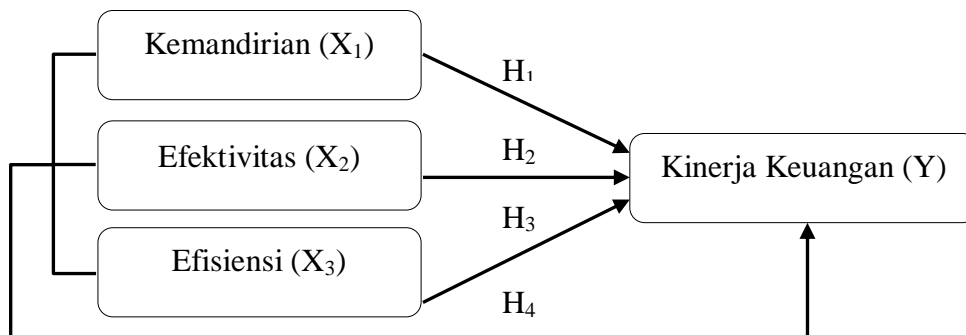
Penelitian yang dilakukan oleh Rasdalima, Luntungan dan Wauran (2018) dengan judul: "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu

software *Statistical Package for Social Sciens (SPSS)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan dan belanja daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Provinsi Sulawesi Utara. Secara parsial pendapatan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Karena terjadi masalah Multikolenieritas maka variabel Pendapatan Daerah dikeluarkan dari model regresi maka variable pendapatan daerah dikeluarkan dari model sehingga model analisis menjadi regresi sederhana yaitu belanja daerah terhadap kinerja keuangan. Dan berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai koefisien Beta belanja daerah adalah 0.683. Kinerja keuangan dipengaruhi oleh belanja daerah sebesar 76.6% sedangkan sisanya 23.4% dipengaruhi variable lain diluar model.

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky (2013) dengan judul: *"Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province)"*. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan yang diukur dari rasio pengeluaran untuk pendapatan, upaya fiskal, kemampuan pendanaan, dan tingkat derajat desentralisasi fiskal menuju sejumlah variabel, yaitu: (1) belanja modal, (2) kinerja keuangan dan kemiskinan, (3) kinerja keuangan dan kemiskinan melalui belanja modal, dan (4) kemiskinan melalui belanja modal dan kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis jalur. Sampel dari penelitian ini adalah 38 kabupaten / kota di Indonesia Provinsi Jawa Timur selama 7 tahun terakhir (2005-2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dari kemampuan pembiayaan menunjukkan pengaruh langsung yang tidak signifikan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan sementara dampaknya terhadap kemiskinan menunjukkan efek signifikan positif. Selanjutnya, dari efek kinerja keuangan tidak langsung melalui modal pengeluaran, ada variabel pengeluaran untuk rasio pendapatan, upaya fiskal, dan tingkat fiskal variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kinerja keuangan (secara positif) dan kemiskinan (secara negatif) sementara untuk kinerja keuangan mempengaruhi melalui pengeluaran modal dan kinerja keuangan terhadap kemiskinan memiliki pengaruh tidak langsung dan negatif yang signifikan, terutama yang diukur menggunakan rasio pengeluaran terhadap pendapatan, upaya fiskal, dan tingkat desentralisasi fiskal. Akhirnya, agar lebih baik kinerja keuangan khususnya perlu mengoptimalkan kemampuan pembiayaan baik dari segi pendapatan dan pengeluaran, dalam hal optimalisasi pendapatan PAD, Silpa, dan pinjaman, sementara pengoptimal pengeluaran perlu melakukan review terhadap pengeluaran yang telah dilakukan.

2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga kemandirian berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa tenggara.
2. Diduga efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa tenggara.
3. Diduga efisiensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa tenggara.
4. Diduga kemandirian, efektivitas dan efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa tenggara.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode asosiatif bertujuan untuk melihat keterhubungan antar variabel penelitian baik variabel *dependent* maupun *independent*. Menurut Sugiono (2014) Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data laporan keuangan melalui Badan Pusat Statistik. Untuk waktu penelitian yaitu enam bulan, dimulai dari persiapan sampai dengan akhir penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari berbagai sumber antara lain : Kantor Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara , BPS (Badan Pusat Statistik) dan beberapa referensi Jurnal-jurnal ilmiah.

Definisi Operasional Variabel

Variabel bebas (X)

Kemandirian (X_1) adalah kemampuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100 \%$$

Efektivitas (X_2) adalah Kemampuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Indikator yang digunakan dalam Efektivitas adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$$

Efisiensi (X_3) adalah rasio yang menggambarkan perbandingan. Indikator besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realsiasi pendapatan yang diterima. Indikator yang digunakan dalam Efisiensi adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Variabel Terikat (Y)

Kinerja keuangan (Y) adalah proses analisis atau prestasi kerja yang dilakukan di bidang keuangan dalam pencapaian suatu pelaksanaan program dalam mewujudkan sasaran.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh kemandirian, efektivitas dan efisiensi terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

$$Y_t = a + b_1 X_{1t} + b_2 X_{2t} + b_3 X_{3t} + e_t$$

Keterangan:

X1 = Kemandirian

X2 = Efektivitas

X2 = Efisiensi

Y = Kinerja keuangan

A = bilangan konstanta

b1, b2, b3 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

e = *error term*

t = 1,2,3,... 15 (*time series* 2005-2019)

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang diterapkan meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi dengan menggunakan Aplikasi Analisis Multivariate (Ghozali, 2012).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik. Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / \text{tolerance}$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\geq 0,01$ atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 .

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi menunjuk pada hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam bentuk waktu atau hubungan antara tempat yang berdekatan. Pada penelitian ini, alat uji yang digunakan adalah uji runs test.

Pengambilan keputusan dalam uji runs test, yaitu:

1. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi
2. Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2. Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2005-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Kemandirian (%)
2005	3.139.211	233.299.810	1.35
2006	33.995.360	231.231.916	14.70
2007	41.369.900	374.710.243	11.04
2008	47.516.790	402.456.040	11.81
2009	53.250.000	453.839.460	11.73
2010	64.250.000	510.839.460	12.58
2011	73.404.996	520.698.963	14.10
2012	119.646.709	494.817.254	24.18
2013	144.721.723	574.504.145	25.19
2014	159.019.275	677.121.867	23.48
2015	225.871.043	767.043.192	29.45
2016	273.392.316	823.013.594	33.22
2017	292.525.557	936.967.599	31.22
2018	354.955.423	1.131.123.897	31.38
2019	316.767.257	1.136.141.852	27.88

Sumber: BPS Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Data diolah, 2020)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian pada Tabel 2 menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dan dana perimbangan tahun 2005-2019 rata-rata rendah sekali, yaitu tahun 2005-2014 dan pada tahun 2015-2019 menunjukkan rasio kemandirian rendah (Halim, 2015).

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Tabel 3. Efektifitas Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2005-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Efektifitas (%)
2005	60.784.220	263.691.920	23,05
2006	65.990.720	276.347.276	23,88
2007	72.312.334	320.255.234	22,58
2008	93.033.580	454.031.170	20,49
2009	104.500.020	549.089.470	19,03
2010	130.255.000	534.340.023	24,38
2011	144.809.992	647.169.850	22,38
2012	219.293.418	643.463.962	34,08
2013	269.443.446	899.152.958	29,97
2014	298.038.550	865.141.142	34,45
2015	431.742.086	1.204.927.490	35,83
2016	496.960.656	1.339.014.429	37,11
2017	282.525.556	1.341.901.222	21,05
2018	344.955.424	1.379.012.001	25,01
2019	316.767.257	1.409.015.444	22,48

Sumber: BPS Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Data diolah, 2020)

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada Tabel 3 menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan tahun 2005-2019 rata-rata tidak efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 4. Efisiensi Keuangan Daerah Kab. Minahasa Tenggara Tahun 2005-2019

Tahun	Realisasi Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Efisiensi
2005	29.377.460	60.784.220	48.33
2006	31.775.474	65.990.720	48.15
2007	29.045.000	72.312.334	40.17
2008	45.630.570	93.033.580	49.05
2009	50.795.010	104.500.020	48.61
2010	43.651.972	130.255.000	33.51
2011	62.698.152	144.809.992	43.30
2012	84.055.261	219.293.418	38.33
2013	125.249.086	269.443.446	46.48
2014	141.419.275	298.038.550	47.45
2015	350.723.622	431.742.086	81.23
2016	434.024.621	496.960.656	87.34
2017	237.795.870	282.525.556	84.17
2018	265.210.778	344.955.424	76.88
2019	278.791.500	316.767.257	88.01

Sumber: BPS Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Data diolah, 2020)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian pada Tabel 4 menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan realisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005-2019 rata-rata efisien.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Kemandirian terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemandirian berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintah dapat meningkatkan PAD dan akan mempengaruhi kinerja keuangan.

Menurut teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah tersebut di harapkan mampu untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah. Tidak hanya itu dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Jika daerah tersebut tidak mampu untuk menerapkan desentralisasi fiskal yaitu berupa pelimpahan wewenang dari pusat maka daerah tersebut akan tertinggal dan menyebabkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Implikasi dari penelitian ini adalah jika dalam masing-masing daerah dapat mandiri dalam mengelola daerahnya maka akan berdampak pada kinerja keuangan.

Rasio kemandirian akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi pada daerah tersebut dan hal itu akan mempengaruhi kinerja keuangan yang tinggi. Demikian juga, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2019) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian rata-rata berada pada kategori rendah sekali.

Pengaruh Efektivitas terhadap Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa keefektifan daerah dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran dan pengelolaan potensi yang ada pada daerah tersebut dan juga memberikan pelayanan masyarakat yang optimal maka akan dapat mengembangkan perekonomian.

Menurut teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan. Jika pemerintah daerah berhasil mencapai target yang telah direncanakan dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. Implikasi dalam penelitian ini adalah jika keefektifan dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas pemerintahan meningkat maka kinerja keuangan akan meningkat juga.

Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syamsudin et al (2015) yang membuktikan bahwa rasio efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Rasio efektivitas memberikan kontribusi terhadap kinerja pada daerah.

Pengaruh Efisiensi terhadap Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa efisiensi daerah dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran dan pengelolaan potensi yang ada pada daerah tersebut dan juga memberikan pelayanan masyarakat yang optimal maka akan dapat mengembangkan perekonomian.

Menurut teori federalisme fiskal, dalam penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Jika pemerintah daerah berhasil mencapai target yang telah direncanakan dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di daerah tersebut. Dengan meningkatnya perekonomian di daerah tersebut maka akan dapat terus meningkatkan infrastruktur guna pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan ke masyarakat dengan optimal seperti meningkatkan mutu kualitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Implikasi pada penelitian ini adalah jika efisiensi dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas pemerintahan meningkat maka akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Berliani (2016) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh dan berdampak pada kesejahteraan manusia atau masyarakat. Dalam indikator kinerja keuangan tersebut di antaranya adalah rasio efisiensi keuangan daerah. Dimana rasio efisiensi memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pada daerah dan itu akan berdampak pada kesejahteraan manusia atau masyarakat pada daerah tersebut.

Pengaruh Kemandirian, Efektifitas, dan Efisiensi terhadap Kinerja keuangan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa kemandirian, efektifitas, dan efisiensi daerah dalam memaksimalkan pengelolaan anggaran dan pengelolaan potensi yang ada pada daerah tersebut dan juga memberikan pelayanan masyarakat yang

optimal maka akan dapat mengembangkan perekonomian. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Hidayat (2018) yang menemukan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh dan berdampak pada kesejahteraan manusia atau masyarakat. Dalam indikator kinerja keuangan tersebut di antaranya adalah rasio efisiensi keuangan daerah. Dimana rasio efisiensi memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pada daerah dan itu akan berdampak pada kesejahteraan manusia atau masyarakat pada daerah tersebut.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Kemandirian berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Efektivitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Efisiensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Kemandirian, efektivitas, dan efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amala, A., Rotinsulu, D. C., & Tumangkeng, Stteva.(2021). Peranan Sektor Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal EMBA Vol . 9 No . 1 Januari 2021* , Hal . 245-255. 9(1), 245–255.
- Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(2), 121–144.
- Erjergit, H., Rorong, I. P., & Tolosang, K. D. (2021). Pengaruh Investasi Swasta Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sorong. In *jurnal EMBA (Vol. 9, Issue 2)*.
- Fahmi. (2012). Analisis Laporan Keuangan. UPP AMP. YKPN Kasmir, Yogyakarta
- Faud, R. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia.
- Ghozali. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. UNDIP, Semarang.
- Halim, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Ke-2). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Handayani. (2013). Manajemen Keuangan (Edisi Satu). Andi, Yogyakarta.
- Hariani, S. (2021). Analysis of Regional Government Financial Performance in South Nias District. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 3(3), 161–171.
- Hidayat, D. R. (2018). Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Terhadap Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009-2014. *Buana Ilmu*, Volume 2 N. <https://doi.org/10.36805/Bi.V2i2.337>
- Kurniasari. (2014). Analisis Laporan Keuangan (Edisi ke-7). UPP AMP, Yogyakarta.

- Kuswadi. (2016). Manajemen Pemerintahan Daerah. Badan Penerbit Universitas Islam "45" (UNISMA), Bekasi.
- Lucky, D. (2013). Analysis of the Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case Study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 4(19), 7–18.
- Mahmudi. (2007). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM, Yogyakarta.
- Mahyudi, A. (2018). Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ramadhani, D., Hisamuddin, N., & Shulthoni, M. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja APBDesa. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 1–12.
- Rasdalima, R. J., Luntungan, A. Y., & Wauran, P. C. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 134–145.
- Restianto. (2011). Kinerja Keuangan (edisi Ke-5). Ghalia Indonesia, Semarang.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147-153.
- Subandi. (2017). Ekonomi Pembangunan (Cetakan Pertama). Alfabeta, Bandung
- Sugiono. (2014). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta, Bandung.
- Sularno. (2011). Kinerja Keuangan. PT Indeks, Jakarta.
- Syam. (2016). Akuntansi Sektor Publik ; Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Ke-4). Salemba Empat, Jakarta.
- Syamsudin, Cahya, B. T., & Dewi, S. D. (2015). Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan. *Jurnal Indonesia Membangun*, 17(1), 15–27.